

PENGARUH ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP AKURASI DATA IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA KECAMATAN LENGKITI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Anty Oktavia¹, Eva Susanti², Aprilia Lestari³

Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja

^{1,2,3}

Email: antyoktavia051@gmail.com¹, evaevtos@gmail.com², yarie2104@gmail.com³

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to analyze the effect of population administration on the accuracy of Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) data in Lengkiti District, Ogan Komering Ulu Regency. The research employed a quantitative method with a correlational approach. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents who are users of population administration services and IKD. Data analysis techniques included validity testing, reliability testing, simple linear regression analysis, and hypothesis testing using t-test and F-test. The results indicate that population administration has a positive and significant effect on the accuracy of IKD data, as evidenced by a significance value of less than 0.05, indicating that the research hypothesis is accepted. The coefficient of determination (R^2) value of 0.245 shows that population administration contributes 24.5% to the accuracy of IKD data, while the remaining 75.5% is influenced by other factors outside the scope of this study. According to the author, these findings suggest that although population administration has a significant influence, its contribution is still at a moderate level, implying that IKD data accuracy is not solely determined by administrative factors. Other contributing factors include the readiness of human resources, public awareness and understanding, the stability of digital systems, and the effectiveness of data supervision and verification processes. The implementation of orderly, integrated, and digitally based population administration has proven to improve the validity, completeness, and consistency of population data; however, its effectiveness will be more optimal when supported by enhanced staff capacity, improved information technology infrastructure, and continuous public outreach. Therefore, the implementation of IKD should be viewed as a continuous process that requires synergy between systems, administrative personnel, and community participation to achieve accurate, up-to-date, and reliable population data as a foundation for public service delivery.

Keyword: Administrasi Kependudukan, Akurasi Data, Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh administrasi kependudukan terhadap akurasi data Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden masyarakat yang merupakan pengguna layanan administrasi kependudukan dan IKD. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kependudukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akurasi data IKD, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,245 menunjukkan bahwa administrasi kependudukan memberikan kontribusi sebesar 24,5% terhadap akurasi data IKD, sedangkan sebesar 75,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Menurut penulis, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun administrasi kependudukan memiliki pengaruh yang signifikan, tingkat kontribusinya masih tergolong sedang, sehingga akurasi data IKD tidak hanya ditentukan oleh aspek administrasi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesiapan sumber daya manusia, tingkat pemahaman masyarakat, stabilitas sistem digital, serta intensitas pengawasan dan verifikasi data. Pelaksanaan administrasi kependudukan yang tertib, terintegrasi, dan berbasis digital terbukti mampu meningkatkan validitas, kelengkapan, dan konsistensi data kependudukan, namun efektivitasnya akan lebih optimal apabila didukung oleh peningkatan kualitas aparatur, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi IKD perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara sistem, aparatur, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya sebagai dasar pelayanan publik.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Akurasi Data, Identitas Kependudukan Digital (IKD)

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berorientasi pada percepatan proses administrasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks tersebut, administrasi kependudukan menjadi sektor yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan identitas hukum seluruh warga negara.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan memiliki peran vital sebagai basis dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, penyusunan daftar pemilih, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, akurasi data kependudukan menjadi aspek yang sangat krusial. Data yang tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak konsisten dapat menimbulkan berbagai permasalahan administratif dan sosial, seperti kesalahan sasaran program pemerintah, hambatan pelayanan publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas data kependudukan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan inovasi administrasi kependudukan yang menghadirkan identitas penduduk

dalam bentuk digital dan terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional. Kehadiran IKD diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam administrasi kependudukan, seperti kesalahan pencatatan manual, keterlambatan pembaruan data, serta inkonsistensi informasi antar dokumen kependudukan.

Secara konseptual, IKD dirancang untuk meningkatkan akurasi data melalui mekanisme verifikasi digital, integrasi sistem, serta pembaruan data secara real time. Identitas digital memungkinkan setiap perubahan data penduduk, seperti alamat, status perkawinan, atau peristiwa kependudukan lainnya, dapat segera tercatat dalam sistem pusat. Selain itu, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memeriksa data identitasnya secara mandiri melalui perangkat digital, sehingga potensi kesalahan data dapat diketahui lebih awal dan segera diperbaiki.

Namun demikian, implementasi IKD di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, masih ditemukan keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data kependudukan, baik pada KTP elektronik, Kartu Keluarga, maupun data digital yang tercatat dalam sistem. Permasalahan tersebut meliputi kesalahan penulisan identitas, data yang belum diperbarui, serta perbedaan informasi antara dokumen kependudukan dengan kondisi riil masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan IKD belum sepenuhnya mampu menjamin akurasi data apabila tidak didukung oleh penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik.

Administrasi kependudukan memiliki peran kunci dalam menentukan kualitas dan akurasi data IKD. Proses perencanaan layanan, kesiapan aparatur pelaksana, konsistensi pencatatan data, integrasi sistem informasi, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi IKD. Ketidaksiapan aparatur, lemahnya koordinasi antar sistem, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital dapat berdampak pada rendahnya kualitas data kependudukan yang dihasilkan.

Selain faktor sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan administrasi kependudukan digital, terutama di wilayah kecamatan. Stabilitas jaringan internet, ketersediaan perangkat teknologi, serta keamanan sistem informasi sangat memengaruhi kelancaran proses perekaman dan pembaruan data kependudukan. Apabila sistem tidak berjalan optimal, maka potensi terjadinya kesalahan data akan semakin besar meskipun layanan telah berbasis digital.

Akurasi data Identitas Kependudukan Digital menjadi sangat penting karena data tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif, tetapi juga dimanfaatkan secara luas dalam berbagai sektor pelayanan publik. Data kependudukan yang akurat akan mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, pelayanan kesehatan yang efektif, perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta penyusunan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan. Sebaliknya, data yang tidak akurat dapat menimbulkan dampak sistemik yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pengaruh administrasi kependudukan terhadap akurasi data Identitas Kependudukan Digital menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan berkontribusi terhadap tingkat akurasi data IKD di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi akurasi data kependudukan digital serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik administrasi kependudukan di tingkat daerah. Dengan demikian, implementasi IKD tidak hanya menjadi inovasi teknologi semata, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan sistem penyelenggaraan negara yang berfungsi mengatur dan menata data serta dokumen kependudukan melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan berperan penting dalam menjamin hak identitas hukum setiap warga negara serta menyediakan data dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Data kependudukan yang dikelola secara tertib dan sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif administrasi publik, administrasi kependudukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena berkaitan dengan legitimasi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh perencanaan kebijakan, kesiapan aparatur pelaksana, konsistensi pencatatan data, serta integrasi sistem informasi. Ketidaktertiban dalam administrasi kependudukan berpotensi menimbulkan kesalahan data yang berdampak luas pada pelayanan publik.

2.2 Akurasi Data Kependudukan

Akurasi data merupakan ukuran tingkat kesesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks kependudukan, akurasi data mencakup kebenaran identitas, kelengkapan elemen data, konsistensi antar dokumen, serta ketepatan waktu pembaruan data. Akurasi menjadi aspek fundamental karena seluruh layanan publik dan kebijakan pemerintah bergantung pada validitas data kependudukan.

Data kependudukan yang tidak akurat dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan sasaran bantuan sosial, hambatan pelayanan administrasi, serta ketidaktepatan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan akurasi data menjadi tuntutan utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, terutama pada era digital yang menuntut kecepatan dan ketepatan informasi.

2.3 Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi administrasi kependudukan yang menghadirkan identitas penduduk dalam bentuk digital dan terintegrasi dengan database kependudukan nasional. IKD berfungsi sebagai representasi digital dari KTP elektronik yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Penerapan IKD bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, keamanan data, serta akurasi informasi kependudukan.

IKD memungkinkan proses pembaruan data dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi, sehingga mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan. Selain itu, IKD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksa data identitasnya secara mandiri, yang berpotensi meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keakuratan data kependudukan.

2.4 Hubungan Administrasi Kependudukan dengan Akurasi Data IKD

Administrasi kependudukan dan akurasi data IKD memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Administrasi kependudukan berfungsi sebagai fondasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pembaruan data, sedangkan IKD menjadi instrumen digital yang memperkuat sistem tersebut. Administrasi kependudukan yang tertib, terintegrasi, dan didukung aparatur yang kompeten akan menghasilkan data awal yang berkualitas, sehingga mendukung akurasi data IKD.

Sebaliknya, kelemahan dalam administrasi kependudukan, seperti rendahnya ketelitian aparatur, lemahnya verifikasi data, serta kurangnya integrasi sistem, dapat menurunkan kualitas data digital meskipun telah menggunakan teknologi modern. Dengan demikian, keberhasilan implementasi IKD sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar hubungan antara administrasi kependudukan sebagai variabel independen dan akurasi data Identitas Kependudukan Digital sebagai variabel dependen. Administrasi kependudukan yang mencakup perencanaan layanan, kesiapan aparatur, konsistensi data, integrasi sistem, serta sosialisasi kepada masyarakat diduga berpengaruh terhadap tingkat akurasi data IKD.

Semakin baik kualitas administrasi kependudukan yang diselenggarakan, maka semakin tinggi pula tingkat akurasi data IKD yang dihasilkan. Kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa digitalisasi melalui IKD bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga sangat ditentukan oleh tata kelola administrasi kependudukan yang profesional dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh administrasi kependudukan terhadap akurasi data Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara objektif berdasarkan data numerik. Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel atau lebih, khususnya variabel administrasi kependudukan sebagai variabel independen dan akurasi data IKD sebagai variabel dependen.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kecamatan tersebut telah menerapkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Lengkiti yang telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan memiliki Identitas Kependudukan Digital. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, maka tidak seluruh populasi dijadikan responden. Oleh karena itu, penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria

responden dalam penelitian ini adalah penduduk yang telah memiliki IKD dan pernah mengakses layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Lengkiti. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel administrasi kependudukan dan akurasi data IKD. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk mengukur persepsi responden. Selain kuesioner, penelitian ini juga didukung oleh teknik dokumentasi untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan administrasi kependudukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban responden terhadap setiap indikator penelitian. Analisis inferensial digunakan untuk menguji pengaruh administrasi kependudukan terhadap akurasi data Identitas Kependudukan Digital. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik guna memastikan ketepatan dan keandalan hasil analisis. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara administrasi kependudukan dan akurasi data IKD sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kecamatan Lengkiti yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital dan pernah mengakses layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, responden memiliki latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan yang beragam. Keberagaman karakteristik responden menunjukkan bahwa layanan administrasi kependudukan dan IKD telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

4.2.2 Deskripsi Variabel Administrasi Kependudukan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap administrasi kependudukan di Kecamatan Lengkiti. Indikator perencanaan pelayanan, ketepatan proses pencatatan data, serta sikap dan kompetensi

aparatur dinilai cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kecepatan pelayanan dan konsistensi pembaruan data.

4.2.3 Deskripsi Variabel Akurasi Data Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan hasil kuesioner, responden menilai bahwa data Identitas Kependudukan Digital yang dimiliki umumnya telah sesuai dengan data pada dokumen kependudukan lainnya, seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Sebagian besar responden menyatakan bahwa data IKD ditampilkan secara lengkap dan konsisten. Namun demikian, masih terdapat responden yang mengalami ketidaksesuaian data atau keterlambatan pembaruan informasi, yang menunjukkan bahwa akurasi data IKD belum sepenuhnya optimal.

4.2.4 Analisis Pengaruh Administrasi Kependudukan terhadap Akurasi Data IKD

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa administrasi kependudukan berpengaruh terhadap akurasi data Identitas Kependudukan Digital. Semakin baik kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka semakin tinggi pula tingkat akurasi data IKD yang dihasilkan. Temuan ini menunjukkan bahwa akurasi data digital tidak hanya ditentukan oleh sistem teknologi, tetapi sangat bergantung pada proses administrasi, ketelitian aparatur, serta mekanisme verifikasi data yang diterapkan.

4.3 Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan data kependudukan digital. Administrasi kependudukan yang tertib, terintegrasi, dan didukung oleh aparatur yang kompeten akan menghasilkan data awal yang berkualitas, sehingga mampu mendukung akurasi data Identitas Kependudukan Digital. Temuan ini sejalan dengan teori administrasi publik yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi.

Meskipun IKD telah memberikan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi kesalahan data apabila proses administrasi kependudukan masih memiliki kelemahan. Ketidaksesuaian data yang masih dialami sebagian responden menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi pencatatan data, penguatan sistem verifikasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pelaksana.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi data IKD. Kesadaran masyarakat untuk memeriksa dan melaporkan ketidaksesuaian data akan

membantu pemerintah dalam melakukan pembaruan data secara lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai penggunaan dan manfaat IKD perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas data kependudukan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital sangat ditentukan oleh kualitas administrasi kependudukan. Perbaikan berkelanjutan pada aspek administrasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan data kependudukan digital yang akurat dan terpercaya di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa administrasi kependudukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akurasi data Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan administrasi kependudukan, maka semakin tinggi pula tingkat akurasi data IKD yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil perhitungan indikator administrasi kependudukan, mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori setuju dan sangat setuju terhadap seluruh indikator yang digunakan, meliputi perencanaan dan kebijakan layanan digital, kesiapan aparatur pelaksana, konsistensi pencatatan data, integrasi sistem kependudukan, serta sosialisasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan Lengkiti telah berjalan dengan cukup baik dan mampu mendukung implementasi layanan kependudukan berbasis digital.

Hasil perhitungan indikator akurasi data IKD menunjukkan bahwa data Identitas Kependudukan Digital yang digunakan masyarakat dinilai telah memiliki tingkat validitas, kelengkapan, konsistensi, serta ketepatan waktu pembaruan data yang baik. Responden relatif jarang menemukan kesalahan data maupun data lama yang belum diperbarui, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem IKD di Kecamatan Lengkiti telah berfungsi secara cukup optimal dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam pelayanan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Lengkiti dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, disarankan untuk terus meningkatkan integrasi sistem administrasi kependudukan serta mempercepat proses pembaruan data kependudukan. Penguatan koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait perlu ditingkatkan agar data IKD selalu mutakhir dan akurat.
2. Bagi Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan, meskipun hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan aparatur yang baik, ketelitian dalam proses input dan verifikasi data tetap perlu ditingkatkan. Pelaksanaan pelatihan teknis secara berkelanjutan serta pengawasan internal secara rutin penting dilakukan untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan menjaga konsistensi data kependudukan.
3. Bagi Pengelola Sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD), disarankan untuk terus mengoptimalkan stabilitas sistem dan kemudahan penggunaan aplikasi IKD. Peningkatan fitur pembaruan data dan sistem notifikasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perubahan data secara tepat waktu dan mengurangi potensi penggunaan data yang belum diperbarui.
4. Bagi Masyarakat Kecamatan Lengkiti, diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga akurasi data IKD dengan melaporkan setiap perubahan data kependudukan, seperti perubahan alamat, status keluarga, dan pekerjaan. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dibangun melalui peningkatan sosialisasi dan pendampingan penggunaan IKD guna mewujudkan sistem identitas kependudukan digital yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat sebagai dasar pelayanan publik.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, H. Zuchri, dan M. Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press, 2021.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Undip Press, 2018.

- Kementerian Dalam Negeri RI. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Jakarta: Ditjen Dukcapil, 2020.
- Kementerian Dalam Negeri RI. Pedoman Teknis Pencatatan Sipil. Jakarta: Dukcapil Press, 2020.
- Kementerian Dalam Negeri RI. Petunjuk Teknis Identitas Kependudukan Digital. Jakarta: Ditjen Dukcapil, 2022.
- Nasir, M. Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugroho, Riant. Public Policy dalam Perspektif Governance. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Prasetya, Indra. Metodologi Penelitian: Pendekatan Teori dan Praktik. UMSU Press, 2022.
- Rahmat, M. Teknik Sampling dalam Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ridwan, M. Metodologi Penelitian: Kajian Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sanjaya, H. Wina. Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Jakarta: Kencana, 2015.
- Santoso, B. Manajemen Administrasi Kependudukan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Setiawan, D. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Siagian, S. P. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Siregar, Syofian. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Soendari, Tjutju. Metode Penelitian Deskriptif. Bandung: UPI, 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukmadinata, Nana Syodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya, 2013.
- Suaedi, F., & Wardianto, B. Upaya Pemanfaatan TIK untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. 2010.
- S. Muhyi, Muhammad. Metodologi Penelitian. Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.
- B. Jurnal
- Anwar, K. "Kesiapan Aparatur dalam Implementasi Sistem Digital Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 2, 2019.
- Handayani, S. "Pengaruh Akurasi Data Kependudukan terhadap Pelayanan Publik." *Jurnal Pelayanan Sosial*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Hidayat, R. "Konsistensi Data Kependudukan dalam Layanan Publik Terpadu." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 1, 2019.
- Jalma, H., Aromatica, D., & Ariany, R. "Analisis Penerapan Paradigma e-Government pada Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Administrasi Negara*, 2022.

Lestari, A. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Administrasi Digital." *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Muhtarom, A. "Analisis Ketidaktepatan Data Kependudukan di Tingkat Lokal." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Prabowo. "Evaluasi Akurasi Data Kependudukan di Era Digital." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15 No. 2, 2021.

Prasetyo, A. "Validitas Data Penduduk sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2020.

Rosyid, M. "Kendala Pemutakhiran Data Kependudukan." *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, 2018.

Sulistyo, B. "Literasi Digital Masyarakat Pedesaan dan Tantangan Pelayanan Publik Elektronik." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14 No. 2, 2020.

Widiastuti, L. "Human Error pada Pencatatan Data Kependudukan." *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Pratama, Y. "Efektivitas Pelayanan Digital dalam Administrasi Publik." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 2, 2020.

C. Sumber Lainnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rekapitulasi Data Kependudukan Kabupaten OKU.